

Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima Tahun 1773-1817 M

Kartini Mawaddah

*Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mawaddah14syafii@gmail.com*

Abstrak

Sultan Abdul Hamid merupakan sultan Bima yang paling lama berkuasa di Kesultanan Bima dan merasakan dua masa yakni, masa VOC dan Pemerintah Hindia Belanda. Sejak awal islamisasi dan sistem pemerintahan bertransformasi, nilai-nilai Islam mulai ditanamkan dalam pemerintahan dan mengalami perkembangan. Ketika Kompeni berhasil mendudukkan Bima, semua serba sulit dan mengalami penurunan. Eksistensi kesultanan pun mulai terancam karena para sultan diperlakukan layaknya boneka dan banyak merugikan masyarakat Bima. Studi ini mengkaji tentang diplomasi pada masa Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah di Bima tahun 1773-1817 M, dengan tujuan untuk menggambarkan bentuk diplomasi yang dijalankan oleh sultan di wilayah Indonesia bagian timur, selain itu juga mendeskripsikan mengenai kebijakan dalam beberapa bidang. Penelitian ini memberikan informasi bahwa Sultan Abdul Hamid berupaya menciptakan suasana Bima yang penuh perdamaian tanpa adanya pertumpahan darah dan berupaya memenuhi semua kebutuhan masyarakat melalui kerjasamanya dengan Kompeni. Ia menciptakan lambang kesultanan sebagai simbol kekuatan Bima dan kekuatan Islam di Bima pada saat itu, yang di dalamnya mengandung makna bahwa semua lapisan masyarakat Bima harus tunduk dan taat pada Hukum Hadat dan Hukum Islam. Melalui kerjasamanya dengan Inggris, pendapatan rakyat bertambah daripada sebelumnya yakni melalui perdagangan bebas ala Inggris. Abdul Hamid merupakan sultan yang mempunyai semangat tinggi terhadap sejarah dan kesenian. Ia berhasil menghimpun catatan-catatan sejarah yang sekarang dikenal dengan Bo' Sangaji Kai, yang berisi tentang gambaran sosial, politik, ekonomi dan budaya yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya.

Kata Kunci: Kesultanan Bima, Kompeni, peranan.

Abstract

Sultan Abdul Hamid was the Bima sultan who ruled for the longest time in the Sultanate of Bima and felt two periods namely, the VOC and the Dutch East Indies. Since the beginning of Islamization and the system of government transformed, Islamic values began to be implanted in government and experienced development. When the Company succeeded in positioning Bima, it was all difficult and declining. The existence of the sultanate began to be threatened because the sultans treated like a doll and much harm the people of Bima. This study examines the diplomacy of the time of Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah in Bima in 1773-1817 AD, with the aim of describing the diplomacy form of the sultan in the eastern part of Indonesia, as well as describing the policy in several fields. This research provides information that Sultan Abdul Hamid seeks to create a peaceful atmosphere of the Milky Way without any bloodshed and seeks to meet all the needs of the community through its cooperation with the Company. He created the imperial emblem as a symbol of the power of the Milky Way and the power of Islam in Bima at that time, meaning that all layers of the Bima community must submit to and obey the Law of Hadat and Islamic Law. Through its engagement with the UK, people's incomes have increased from the previous through free trade in the UK. Abdul Hamid is a sultan who has a passion for history and art. He succeeded in

collecting historical records now known as Bo 'Sangaji Kai, which contained the social, political, economic and cultural features that were read by later generations.

Keywords: Sultanate of Bima, colonial, action

Pendahuluan

Bima¹ merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelah barat merupakan Kabupaten Dompu, sebelah timur Selat Sape, sebelah utara Laut Flores, dan sebelah selatannya adalah Samudera Indonesia. Ditinjau dari segi geografis, Bima memiliki potensi yang besar untuk menjadi daerah yang lebih maju terutama dalam sektor perdagangan. Hal ini karena letaknya yang strategis, yakni di tengah kepulauan Nusantara. Selain itu, didukung pula oleh hasil alamnya yang melimpah seperti kayu sogu (kayu untuk pemberi warna), rotan, damar, kuda, kerbau, dan lain-lain.²

Konon, penamaan daerah Bima diambil dari nama seorang pendatang dari Jawa yang tiba di Pulau Satonda³ dan beranak pinak, bernama Sang Bima. Abdullah Tajib menerangkan bahwa, tokoh ini merupakan personifikasi dari tokoh pewayangan Jawa yang memiliki kekuasaan dan kesaktiannya yakni Sang Bima.⁴ Keturunan Sang Bima inilah kemudian diklaim sebagai penguasa sah di tanah Bima dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang lebih maju dari sebelumnya. Menurut Ismail, Sang Bima ini merupakan putera dari Maharaja Pandu Dewanata yang merupakan anak dari Maharaja Tunggal Pandita, sedangkan saudara Tunggal Pandita adalah Maharaja Indra Ratu yang merupakan asal-usul raja-raja Luwu dan Sawerigading di Sulawesi Selatan.

¹ Selain nama Bima, daerah yang berada di ujung timur Pulau Sumbawa ini juga dikenal dengan nama *Mbojo* yang berasal dari kata *babuju* yang berarti menggunduk dan tinggi. Lihat Nurhilaliati, "Konflik Politik Internal Kerajaan: Prolog Islamisasi Massif dan Struktural di Bima", *Ulumuna*, Vol. IX. Edisi 15. No. 1. Januari-Juni 2005, hlm. 37.

² M. Hilir Ismail, *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara* (Mataram: Lengge, 2004), hlm. 4.

³ Pulau yang terletak di sebelah barat laut Pulau Sumbawa, dekat Gunung Tambora. Pulau ini terletak dalam jalur perdagangan dan pelayaran dari barat ke timur dan sebaliknya. Lihat Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo* (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1995), hlm. 43.

⁴ Lihat Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, hlm. 43.

Walaupun Sang Bima adalah pendiri Kerajaan Bima, namun raja pertamanya adalah anaknya bernama Indra Zamrut. Berdirinya Kerajaan Bima masih belum ada kepastian kapan waktunya.⁵

Pada perkembangannya, sistem kerajaan hanya berlaku sampai raja ke-27 yakni setelah masuk Islamnya raja La Ka'i. Islamisasi di Bima tidak lepas dari peran Gowa sebagai salah satu pusat kerajaan Islam di Nusantara. Ketika Gowa berupaya meluaskan sayapnya ke Pulau Sumbawa, islamisasi pun dilakukan di daerah ini. Raja La Ka'i memeluk Islam pada 7 Februari 1621 M dan dididik dalam agama Islam oleh dua orang muballig asal Sumatra yaitu Datuk ri Bandang dan Datuk ri Tiro,⁶ kemudian ia berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir (1620-1640 M). Setelah La Ka'i masuk Islam, sekitar 19 tahun kemudian (tahun 1640 M) sistem kerajaan resmi diganti menjadi kesultanan dan Abdul Kahir dinobatkan sebagai sultan pertama di Kesultanan Bima.⁷

Kesultanan Bima sampai akhir masa kesultanan telah diperintah oleh 14 orang sultan dengan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai sultan terakhir. Pada masa sultan kedelapan, Abdul Kadim, tepatnya tanggal 9 Februari 1765 M Belanda memaksanya untuk menandatangani Kontrak Monopoli Dagang, sehingga Bima harus tunduk kepada politik monopoli dagang Belanda dan meninggalkan politik dagang bebasnya yang sudah dijalankan jauh sebelum Islam masuk. Sejak itu Bima tidak boleh berhubungan dengan bangsa lain dan hasil bumi harus dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat merugikan perkembangan ekonomi Bima selanjutnya.⁸ Sebelum perjanjian ini, sudah ada perjanjian-perjanjian antara Bima dengan VOC, namun

⁵ Lihat Ismail, *Peran Kesultanan Bima*, hlm. 35.

⁶ Suryadi, "Sepuluh Surat Sultan Bima Abdul Hamid Muhammad Syah Kepada Kompeni Belanda" dalam Henri Chambert-Loir, dkk., *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm. 124.

⁷ M. Fachrir Rahman, "Kontroversi Sejarah Kehadiran Islam di Bima", *Ulumuna*, Vol. IX. Edisi 15. No. 1. Januari-Juni 2005, hlm. 26.

⁸ Ismail, *Peran Kesultanan Bima*, hlm. 115-116.

dengan adanya perjanjian tahun 1765 ini semakin memperkuat posisi VOC di Bima dan berdampak besar bagi pemerintahan Abdul Hamid.

Adanya kegoncangan politik yang terjadi di lingkungan kesultanan pada masa Sultan Abdul Kadim⁹ telah mengundang campur tangan Belanda dan sangat merugikan Bima, sehingga menyebabkan Bima terjatuh dalam sistem monopoli. Ketika dalam kondisi seperti ini, Sultan Abdul Kadim wafat pada tahun 1773 M¹⁰ dan kekuasaan dilimpahkan kepada anaknya, Abdul Hamid. Pada saat Abdul Hamid naik tahta, Bima sudah satu abad di bawah kekuasaan Kompeni. Kontrol Belanda di bidang politik dan ekonomi berakibat Kerajaan Bima bukan lagi pusat perniagaan antarpulau di kawasan Indonesia Timur, sehingga kehilangan berbagai sumber kemakmuran.¹¹

Perubahan ekonomi Bima akibat penguasaan penuh oleh Kompeni sangat dirasakan oleh masyarakat Bima. Imperialisme Belanda menyebabkan berkurangnya pendapatan rakyat. Para pedagang Belanda yang berniaga di Bima mengatur sendiri harga barang dan kapal-kapal Bima yang berniaga ke berbagai pelabuhan yang dikuasai Kompeni diawasi secara ketat serta dikenai bea cukai yang tinggi. Ketika Abdul Hamid berkuasa, kapal-kapal Bima dipermudah dalam pelayarannya oleh Kompeni.¹²

Penelitian tentang kebijakan Sultan Abdul Hamid ini dikaji dengan menggunakan pendekatan biografis guna melihat Sultan Abdul Hamid secara individual, sehingga mudah untuk mengungkapkan sejarah yang berkaitan dengan diri sultan. Pendekatan biografis ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang subyek, dan berusaha menetapkan dan menjelaskan dengan teliti kenyataan-kenyataan hidupnya, pengaruh-pengaruh yang diterima subyek itu dalam masa formatif kehidupannya, sifat dan watak subyek, serta

⁹ Kegoncangan politik yang terjadi pada masa Abdul Kadim terjadi akibat adanya campur tangan kakaknya, Kumalat Syah, terhadap urusan pemerintahan di Bima. Selengkapnyanya baca Ismail, *Peran Kesultanan Bima*, hlm. 112-117.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

¹¹ Henri Chambert-Loir, dkk., *Iman dan Diplomasi*, hlm. 13.

¹² Terdapat dalam surat kode P Sultan Abdul Hamid. Surat tersebut berisi tentang permintaan Abdul Hamid kepada Kompeni untuk mempermudah kapal Bima yang datang untuk berniaga di Pelabuhan Betawi serta meminta keringanan bea cukai.

nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan,¹³ dengan harapan mengetahui dan merekam kejadian dan situasi yang mengitari tokoh Abdul Hamid.¹⁴ Selain pendekatan biografis, juga digunakan pendekatan sosial-politik menurut Rush dan Althoff. Sosiologi politik adalah bidang subjek yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami peristiwa-peristiwa sosial dan politik di Bima sebelum dan saat pemerintahan Sultan Abdul Hamid.

Teori yang dipakai untuk mengkaji kebijakan Sultan Abdul Hamid adalah teori peranan sosial karena Abdul Hamid yang mempunyai kedudukan tinggi di Bima tentu akan mempunyai peran penting di Bima serta disegani dan dihormati oleh masyarakat. Teori peranan sosial ini dikembangkan oleh Erving Goffman, yang didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau norma-norma yang diharapkan dari orang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial.¹⁶ Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹⁷ Dalam hal ini, peranan mencakup tiga hal,¹⁸ yaitu: Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Pemimpin merupakan tokoh sentral dalam sebuah kelompok, organisasi, dan masyarakat. Begitu pula dengan Sultan

¹³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 137.

¹⁴ Taufik Abdullah, *Manusia dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta: LP3S, 1978), hlm. 4.

¹⁵ Lihat Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11.

¹⁶ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 68.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 212.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

Abdul Hamid yang menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga masyarakat dan dengan teori peranan ini untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid dalam masyarakat di wilayah kekuasaannya. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Terdapat beberapa tulisan yang sedikit mengulas tentang Sultan Abdul Hamid. Pertama, buku yang ditulis oleh Henri Chambert-Loir, dkk. berjudul *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta 2010. Buku ini berisi tentang isi surat-surat Sultan Abdul Hamid yang dikirim kepada Kompeni. Kedua, buku yang ditulis oleh Abdullah Tajib berjudul *Sejarah Bima Dana Mbojo*, Jakarta, Harapan Masa PGRI, 1995. Buku ini berisi tentang sejarah Bima dan periodisasinya, yang diawali dengan proses terbentuknya *ncuhi-ncuhi* sampai berakhirnya Kesultanan Bima yakni pada masa Sultan Muhammad Salahuddin. Ketiga, buku yang ditulis oleh Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin berjudul *Bo' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima* yang diterbitkan di Jakarta oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2012. Buku ini berisi tentang beberapa kutipan naskah Bo' Kerajaan Bima beserta latar historis yang terkandung dalam naskah tersebut. Dalam karya-karya tersebut, mengenai Sultan Abdul Hamid belum diungkapkan secara utuh.

Pembahasan

Cita-cita Kompeni yang ditanamkan di tanah Bima tidak menyurutkan semangat Abdul Hamid untuk berupaya mengembalikan kedaulatan Bima. Ia menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Kompeni dengan tujuan-tujuan tertentu. Sikap seperti ini tidak ditunjukkan oleh sultan-sultan sebelumnya. Selain itu, ketika Inggris datang kembali ke Indonesia dan pemerintahan dipegang oleh Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles tahun 1811-1816 M,

Bima tidak lagi terikat dengan monopoli Belanda namun kembali mencari dan menemukan patron baru yakni Inggris.¹⁹

Semenjak Belanda menguasai Bima, perubahan tidak hanya terjadi pada beberapa hal yang telah disebutkan di atas, namun berpengaruh pula pada eksistensi kesultanan. Perlakuan Belanda yang menjadikan sultan Bima layaknya boneka merupakan salah satu bukti bahwa eksistensi kesultanan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan mereka telah mencampuri urusan internal maupun eksternal kesultanan. Untuk hal tersebut, melalui Majelis Paruga Suba, diberlakukan bendera/lambang kesultanan berbentuk garuda berkepala dua yang menjadi simbol kekuatan dan kedaulatan Bima meskipun berada di bawah kendali Belanda sejak abad 17; dan baru beberapa tahun setelah Abdul Hamid yakni pada masa Sultan Ibrahim, Belanda melarang pengibaran bendera kesultanan. Menurut Belanda, dengan dikibarkannya bendera tersebut dapat memicu tumbuhnya semangat untuk kembali melawan Belanda setelah peristiwa Perang Ngali tahun 1908-1909.²⁰ Hal ini membuktikan bahwa kekuatan dan kedaulatan Bima dapat disimbolkan dengan lambang kesultanan tersebut.

Untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan, perdamaian, dan kemakmuran masyarakat Bima, Sultan Abdul Hamid menempuh beberapa jalan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan.

Bidang Politik

Pada periode Abdul Hamid, hubungan Bima-Belanda sangat erat, seperti yang tercantum di dalam Bo' yang berbunyi "*hanya sultan satu ini juga yang ada berbahagia kepada Kompeni*".²¹ Hubungan yang erat ini dapat dilihat dari seringnya kedua belah pihak saling surat-menyurat dan bertukar hadiah. Hadiah yang biasanya dikirim sultan untuk Gubernur di Batavia berupa lilin,

¹⁹ Ismail, *Peran Kesultanan Bima*, hlm. 127.

²⁰ Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, hlm. 197.

²¹ Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo' Sangaji Kai*, hlm. 356.

sarang burung, kuda, dan budak.²² Sebagai kerajaan Islam tradisional yang masih minim dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, Bima mencari sandaran patron kepada Belanda yang sudah menguasai teknologi persenjataan untuk menjaga kedaulatan Kesultanan Bima yang sering dirongrong oleh kerajaan tetangga salah satunya adalah Kerajaan Gowa dan bajak laut.

Sikap kompromis yang ditunjukkan Abdul Hamid kepada Kompeni merupakan salah satu strateginya untuk mendapatkan hati Kompeni demi kepentingan politik dan ekonomi Bima. Hubungan “persahabatan” tersebut dimanfaatkannya untuk mendapatkan pasokan senjata sebagai alat pertahanan militer terutama dalam melawan para bajak laut yang merugikan Bima. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk saling membantu jika salah satu pihak terlibat perang. Seperti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1777, satu pasukan dari Bima yang dipimpin oleh Jeneli Monta berangkat ke Makassar untuk membantu Kompeni.²³

Abdul Hamid merupakan sultan Bima yang paling lama berkuasa dan merasakan kekuasaan rezim VOC dan suksesornya, Pemerintah Hindia Belanda. Sementara tahun 1811-1816 adalah masa kekuasaan Inggris di Nusantara, yang untuk sementara menyingkirkan Belanda. Menurut Ismail, dalam periode kekuasaan Inggris tersebut Abdul Hamid juga sering berkirim surat kepada Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles.²⁴

Lambang Kesultanan Bima

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Kesultanan Bima sudah menggunakan lambang burung garuda sebagai lambang resmi kesultanan. Pada masa Sultan Abdul Hamid, sultan menghimpun asas pemerintahan, struktur pemerintahan, susunan pola masyarakat yang diabadikan dalam bentuk bendera atau lambang tersebut. Bendera tersebut dikibarkan pada kantor pemerintah dan

²² Sultan Bima sering dikirim hadiah dari Kompeni berupa cermin dan arloji yang dibawa dari Batavia. Pada waktu itu cermin merupakan benda berharga, karena pada waktu itu cermin baru dikenal oleh orang Bima. Baca juga dalam surat-surat Abdul Hamid.

²³ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁴ Ismail, *Peran Kesultanan Bima*, hlm. 120.

tempat umum sebagai lambang kedaulatan dan kuatnya sistem pemerintahan. Lambang kesultanan tersebut diresmikan melalui ketetapan Majelis Paruga Suba²⁵ pada hari Selasa 22 bulan Dzulkaidah 1203/15 Agustus 1789.²⁶

Kodifikasi Undang-undang Kesultanan Bima

Pada masa Abdul Hamid, hukum dan peraturan sudah mulai dicatat dan dikodifikasikan. Sultan menyusun dan menetapkan kodifikasi hukum tertulis yang teratur. Pada tahun 1797, ia memerintahkan juru tulisnya untuk mencatat dalam Bo' Sangaji Kai sebuah kitab undang-undang sebanyak 119 pasal tentang peradilan, tata sosial, pertanian, hukum perdata dan hukum pidana.²⁷ Jika dilihat dari administrasi ketetanegaraan, Kesultanan Bima memiliki perangkat yang lengkap. Pada garis besarnya meliputi: bab I mengenai Hukum Adat, bab II mengenai Hukum Syahbandar/Dagang, dan bab III mengenai Hukum Agama²⁸ serta Titah Duli Yang Dipertuan sebagai pelengkap. Hukum Hadat dibagi menjadi hukum pidana hadat dan hukum perdata hadat. Rakyat dididik secara perorangan atau berkelompok untuk menghargai kemerdekaan dan milik perorangan serta menjaga kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat.²⁹

Pemberlakuan hukum Islam dalam sebuah daerah merupakan salah satu indikator berkembangnya Islam di daerah tersebut. Pada tata laksana pemerintahan Kesultanan Bima, pengaruh Kerajaan Gowa cukup dominan

²⁵ Majelis Paruga Suba merupakan dewan pemerintahan sehari-hari. Majelis ini berfungsi dan berwenang untuk: 1) memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan dalam semua aspek yang menyangkut kerajaan. 2) berwenang untuk menghentikan dan mengangkat raja/sultan. 3) berwenang dalam memaklumkan perang. 4) bertanggung jawab tentang hubungan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah Hindia Belanda dan hubungan persahabatan dengan kerajaan tetangga. Lihat Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, hlm. 187-188. Berdasarkan fungsi dan wewenang dari Majelis Paruga Suba, majelis tersebut sama dengan Dewan Hadat.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 198.

²⁷ Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam, dalam pendahuluan, dalam Henri Chambert-Loir, dkk., *Iman dan Diplomasi*, hlm. 13.

²⁸ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), hlm. 22-23.

²⁹ Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, hlm. 202.

termasuk dalam hal pemberlakuan hukum Islam. Pengakuan Kesultanan Bima terhadap keberlakuan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan di wilayah Kesultanan Bima terlihat pada lambang Kesultanan Bima yang berbentuk burung Garuda berkepala dua, dua sayap, dan ekor yang terbentang. Kepala yang sebelah kanan melambangkan hukum Islam dan kepala sebelah kiri melambangkan pemberlakuan hukum adat.³⁰

Di Bima, lembaga peradilan Islam tersebut dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Penggunaan istilah Mahkamah Syar'iyah tersebut dimulai sejak 14 Agustus 1788 yakni pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid.³¹ Bukan berarti sebelumnya belum ada hukum Islam, tetapi masa ini hukum Islam semakin dipertegas keberadaannya di tengah masyarakat Bima, sebagaimana disimbolkan dalam lambang kesultanan.

Bidang Keagamaan

Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah *Dhill Allah Fî al-'Âlam* merupakan orang yang menyempurnakan pembangunan masjid setelah ayahnya wafat. Ia melakukan renovasi terhadap masjid yang dibangun oleh ayahandanya pada tahun 1737 M. Masjid tersebut terletak di Kampung Sigi Kelurahan Paruga di sebelah selatan alun-alun, yang kini terdapat makam Abdul Hamid. Pembangunan tersebut kemudian diselesaikan oleh anaknya pada tanggal 13 Desember 1780. Hal ini dapat diketahui dari ukiran yang terdapat pada pintu sampai ke ruangan dalam.³²

Laporan dari G.R. Rouffaer yang dikutip oleh Abdullah Tajib menerangkan tentang tulisan yang terdapat di atas pintu masjid tersebut yang berbunyi: "*Hedjrat al-Nabi Sallallahu alaihi wassalam sariboe saratoes 49 enam belas hari boelan Dzoelhejah tatkala itu as Sultan Abdul Kadim dan wazir Ismail memboewat ini*".³³ Adapun inskripsi yang terdapat di atas pintu sebelah selatan berbunyi:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 195.

³¹ *Ibid.*, hlm. 196.

³² Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, hlm. 233.

³³ *Ibid.*, hlm. 224.

*“Hedjrat al-Nabi Sallallahoe alaihi wassalam sariboesaratoes 94 anam belas hari boelan Dzulhejah,³⁴ masa itoe as Soeltan Abdul Hamid wazir Muhajiddin”.*³⁵

Namun menurut *Henri Chambert-Loir*, masjid tersebut tidak mungkin dibangun oleh Abdul Kadim tahun 1737 karena pada tahun tersebut Abdul Kadim baru berumur dua tahun.³⁶ Menurutnya, masjid kesultanan yang terletak di Kampung Sigi tersebut dibangun pada 1 Januari 1779 M Masjid tersebut mempunyai atap persegi tiga tingkat.³⁷

Kitab Pegangan Para Sultan Bima

Sejak Sultan Abdul Kahir, ruh-ruh Islam sudah mulai tertanam dengan baik dalam sistem pemerintahan Kesultanan Bima dan terus mengalami perkembangan. Untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Islam, Kesultanan Bima mempunyai beberapa kitab yang menjadi pegangan para sultan dan bangsawan dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka baik yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun urusan negara/pemerintahan, salah satu kitab yang menjadi bacaan wajib bagi para sultan dan bangsawan Bima adalah kitab *Nûr al-Mubîn fî I'tiqâdi kalimat Syahadataini*.³⁸

Pada halaman 18 kitab *Nûr al-Mubîn* disebutkan bahwa kitab tersebut berasal dari kitab yang disalin pertama kali oleh Sultan Abdul Hamid Syah *Dhill Allah Fî al-‘Âlam* dari kitab *Ibnu al-Syariif Alwi al-Sayyid al ‘Allâmah al-Syarif Ibnu Bakry ‘Ârif Billahi Ta’âlâ Asy’ari al-Ghazali al-Hudlramî min al-Târîm*, kitab peninggalan Sultan Abdul Kadim. Sultan Abdul Hamid selesai menyalinnya pada tanggal 20 Rajab 1200 H/19 Mei 1786 M. Kitab tersebut berisi tentang pengenalan hakikat *I’tiqad* yang sebenarnya untuk mengenal dua kalimat syahadat, yakni sifat-sifat Allah SWT dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW.

³⁴ 16 Dzulhijah 1194 H = 13 Desember 1780 M. Lihat Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, hlm. 234.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Henri Chambert-Loir, dalam pengantar, Henri Chambert-Loir, dkk., *Iman dan Diplomasi*, hlm. 32.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁸ Helius Sjamsuddin, *Memori Pulau Sumbawa*, hlm. 21.

Sifat Allah dalam syahadat pertama terdapat pada halaman 5-10 dan sifat Rasul-Nya dalam syahadat kedua terdapat pada halaman 11-18.³⁹

Bidang Ekonomi

Setelah beberapa tahun Kompeni menguasai Bima dan memberlakukan sistem monopoli, ekonomi Bima mengalami kemunduran. Bima tidak boleh berhubungan dengan kerajaan atau daerah lain terutama dalam bidang ekonomi, begitupula dengan kerajaan lain tidak boleh berdagang di Bima. Namun, kedatangan Inggris membawa sedikit cahaya bagi perekonomian Bima.

Abad 19 merupakan masa jaya bagi Inggris yang muncul sebagai kekuatan maritim terbesar. Kekalahan Perancis dalam Perang Napoleon menjadikan Inggris lebih mapan lagi dalam penguasaan laut, terutama penguasaan jalur-jalur pelayaran dan perdagangan. Kepentingan yang diutamakan Inggris adalah perdagangan dan strategi politiknya ditujukan kepada penguasaan perdagangan dan pengamanan jalur perdagangan.⁴⁰ Zaman pendudukan Inggris di Indonesia hanya berlangsung selama lima tahun, yaitu antara tahun 1811-1816. Azas-azas pemerintahan Inggris untuk sementara ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India.⁴¹

Pada hakekatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompeni Belanda dalam kerjasama dengan raja-raja dan para bupati. Secara konkrit, Raffles berkeinginan menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama masa VOC selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya para petani. Jelaslah kiranya bahwa Raffles dalam hal ini telah dipengaruhi oleh cita-cita

³⁹ Abdul Gani, *Peradilan Agama*, hlm. 212.

⁴⁰ Adrian B. Lapien, *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 273.

⁴¹ Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 57.

revolusi Perancis dengan semboyannya mengenai kebebasan, persamaan dan persaudaraan bagi setiap warga.⁴²

Sejak adanya Kapitulasi Tuntang,⁴³ Kesultanan Bima berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada saat itu pemerintahan untuk sementara dipegang oleh Jenderal Thomas Stamford Raffles. Jenderal tersebut mempunyai hubungan yang baik dengan Sultan Abdul Hamid. Keduanya seringkali surat-menyurat untuk membahas masalah ekonomi dan kebudayaan Bima. Manifestasi dari keakraban tersebut, Raffles dalam bukunya *History of Java* sempat mengabadikan sisa-sisa aksara Bima yang masih dipergunakan sebagai alat penghubung dalam surat-menyurat pada waktu itu.⁴⁴

Berdasarkan azas-azas ekonomi yang diterapkan Raffles di Indonesia, mulai saat itulah perdagangan bebas diaktifkan kembali di Bima. Namun, perdagangan bebas yang berlaku adalah perdagangan bebas ala Inggris. Hal itu ditandai dengan adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli pedagang Inggris saja. Walaupun demikian, pendapatan rakyat Bima melalui sistem perdagangan seperti ini bertambah/meningkat.⁴⁵

Kesimpulan

Abdul Hamid adalah salah satu keturunan dari Sang Bima yang merupakan pendiri Kerajaan Bima, sehingga ia berkesempatan untuk melanjutkan misi nenek moyangnya itu. Faktor lingkungan juga mempengaruhi sifat dan sikap sultan selama hidupnya. Putra dari Abdul Kadim ini berkuasa selama kurang lebih 44 tahun dan sudah menerapkan beberapa kebijakan. Bidang politik, ia memanfaatkan hubungan baiknya

⁴² *Ibid.*

⁴³ Kapitulasi Tuntang merupakan hasil akhir dari penyerbuan Inggris atas Belanda di Batavia. Jenderal Jansens pengganti Daendels mengundurkan diri ke arah Jatinegara tanpa memberikan perlawanan dan kemudian kabur ke Jawa Tengah. Jenderal Jansens akhirnya menyerah kepada Inggris di Desa Tuntang (sebelah selatan Semarang) dan berakhir dengan Kapitulasi Tuntang pada tanggal 11 September 1811. Kapitulasi Tuntang itu memuat antara lain: Jawa, Madura, Palembang, Sunda Kecil, Makassar semua dinyatakan di bawah kekuasaan Inggris. Lihat Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, hlm. 230.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 235.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 236.

dengan Kompeni sebagai jalan untuk memperoleh kepentingan Kesultanan Bima. Siasat politiknya ini dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan alat persenjataan dan keamanan perdagangan. Selain itu, ia juga mempertegas keberadaan Hukum Hadat dan Hukum Islam, menciptakan lambang kesultanan berbentuk garuda berkepala dua sebagai simbol kedaulatan Bima, serta mengodifikasi hukum-hukum tersebut agar seluruh masyarakat Bima memperhatikan dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Bidang keagamaan, ia memperkuat posisi lembaga Peradilan Islam dengan memberi nama Mahkamah Syar'iyah, menyempurnakan pembangunan masjid yang telah dibangun ayahnya, dan ia telah menyalin naskah kitab *Nûr al-Mubîn* yang merupakan bacaan wajib bagi para sultan dan pejabat pemerintah kesultanan. Bidang ekonomi, sultan menyetujui perdagangan bebas ala Inggris, dan memerangi bajak laut.

Salah satu manfaat sejarah adalah sebagai *Ibrah* atau pelajaran. Untuk generasi sekarang, kita sangat perlu menjaga kebudayaan dan sejarah lokal sebagaimana semangat dan usaha Sultan Abdul Hamid. Penelitian tentang Sejarah Bima terutama sebelum terjadi letusan Gunung Tambora dan lebih khususnya tentang Sultan Abdul Hamid masih perlu dikaji lagi dengan menggunakan sumber-sumber primer, seperti catatan kerajaan, surat-surat, dan arsi-arsip lainnya. Selain itu, perlu dikaji tentang Sultan Abdul Hamid dalam konteks *Jawharat al-Ma'arif* yang muncul pada masa akhir kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Peradilan Agama Islam dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima 1947-1957*. Mataram: Lengge, 2004.
- Abdullah, Taufik. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3S, 1978.
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Chambert-Loir, Henri. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004.
- Chambert-Loir, Henri dan Siti Maryam R. Salahuddin. *Bo' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Chambert-Loir, Henri, dkk. *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, t.t.
- Ismail, M. Hilir. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Mataram: Lengge, 2004.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid IV. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Lapian, Adrian B. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Sahid, Komarudin. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sjamsuddin, Helius. *Memori Pulau Sumbawa: Tentang Sejarah, Interaksi Budaya dan Perubahan Sosial-Politik di Pulau Sumbawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Tajib, Abdullah. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1995.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

Sumber Jurnal

- Nurhilaliati. "Konflik Politik Internal Kerajaan: Prolog Islamisasi Massif dan Struktural di Bima". *Jurnal Ulumuna*, Vol. IX. Edisi 15. No. 1. Januari-Juni 2005.
- M. Fachrir Rahman. "Kontroversi Sejarah Kehadiran Islam di Bima". *Jurnal Ulumuna*, Vol. IX. Edisi 15. No. 1. Januari-Juni 2005.